

Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui Program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019

Vivih Ashfia Haq

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: vivihah@upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci:
Rumah Keluarga Indonesia
Partisipasi Politik
Perempuan

Article History

Dikirim : 20 Desember 2023

Diterima: 22 Februari 2024

Dipublikasi: 29 Februari 2024

Rumah Keluarga Indonesia menjadi strategi bagi PKS dalam menjaring kader-kader perempuan baru. PKS menjadikan perempuan sebagai bagian dari aktivitas politik partainya. Kesuksesan program ini membawa pengaruh bagi PKS yaitu dengan terdapatnya peningkatan jumlah kader perempuan baru periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai peranan politik kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan program RKI guna menjaring kader-kader baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah para kader PKS Depok dan masyarakat khususnya kalangan perempuan yang terlibat di dalam program Rumah Keluarga Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran representatif perempuan di dalam politik yang dikemukakan oleh Anne Phillips dan Hana Pitkin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RKI menunjukkan keberhasilan bagi PKS dengan adanya kenaikan jumlah kader baru, PKS menggunakan strategi peran representatif deskriptif dan juga simbolik untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mempercayai bahwa PKS adalah partai yang cocok dan sejalan dengan visi-misinya.

Pendahuluan

Peran perempuan saat ini tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga di dalam lingkup domestik. Perubahan yang terjadi telah menyebabkan pergeseran peran perempuan untuk lebih aktif terlibat di luar lingkungan domestik. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik pada era modernisasi dan globalisasi saat ini tidak hanya terbatas pada aktivitas ekonomi, tetapi juga merambah ke sektor politik yang sangat strategis. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik telah membuka peluang luas bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan salah satu tema besar yang selalu muncul dalam diskursus mengenai



reposisi peran perempuan dalam politik. Salah satu aspek yang selalu muncul dalam diskursus ini adalah persoalan mengenai representasi kaum perempuan dalam struktur politik, termasuk pula keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan yang belum cukup memadai. Persoalan ini muncul terutama bila membandingkan secara dikotomis antara eksistensi perempuan dalam konteks kuantitatif sebanding dengan setengah populasi nasional maupun daerah.

Realitas partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif periode 2019-2024 sudah bermunculan. Dari 575 Anggota DPR RI yang terpilih ada 118 perempuan atau sebesar 20,5% (KPU RI, 2019). Jika melihat di tingkat Kabupaten/kota, merupakan gambaran nyata pentingnya partisipasi politik perempuan untuk menguatkan peranan mereka dalam kebijakan- kebijakan yang bersifat afirmatif. Di Kota Depok pada pemilu legislatif 2019 mencapai angka 26% jumlah keterwakilan perempuan. Jumlah ini sangat ironis jika dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan yang jauh lebih banyak daripada laki-laki (50,28% dan 49,72%). Kondisi inilah yang menimbulkan wacana tentang representasi perempuan dalam politik telah menjadi topik penting di banyak negara, termasuk Indonesia.

Perempuan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam terlibat dalam politik, termasuk tantangan di lingkungan domestik. Tantangan ini tidak dapat diabaikan karena perempuan harus menyelaraskan peran domestik dan politiknya. Salah satu langkah yang bisa diambil perempuan untuk terlibat di ruang politik ialah dengan menjadi bagian dari partai politik. Partai politik menjadi pilar pada upaya yang dilakukan perempuan dalam menjalankan dan menyelaraskan peran domestik dan peran politiknya. Partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar. Namun realitas saat ini kehadiran perempuan kurang didukung karena peranan ganda yang dimilikinya. Persepsi yang kurang mendukung terhadap peran domestik dapat menjadi hambatan bagi perempuan Indonesia, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Emezat H. Mengesha (2022) penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi perempuan di partai politik yang ada di Ethiopia sangat beragam. Perempuan yang beraneka ragam dari suku, daerah, agama, status golongan menyebabkan adanya identitas perempuan

sangat banyak dalam merepresentasikan kelompoknya. Namun hadirnya perempuan di partai- partai ini terhalang oleh budaya patriarki yang sudah mengakar di sistem politik Ethiopia, sehingga perempuan yang terlibat di dalam partai politik sulit untuk mencapai peran substantif dan representasinya di dalam politik, dalam artian melakukan program-program yang sifatnya sebagai tanggung jawab sosial. Perempuan di sana dihadapkan pada dua pilihan jika mereka ingin menjadi politisi: meninggalkan keluarga atau meninggalkan partai politik. Dalam penelitiannya Mengesha (2022) menyarankan perlu adanya peninjauan kembali mengenai peraturan dan program partai politik dalam rangka memandu AD/ART Partai dan peninjauan kembali terkait peranan perempuan itu sendiri di dalam partai, perlunya kejasama LSM untuk membantu mengadvokasi perempuan dalam kepemimpinan di partai.

Hadirnya bidang-bidang yang menaungi isu keperempuanan di dalam partai politik ini menjadi proses partisipasi sosial politik melalui program-program pemberdayaan sehingga menjadi fenomena menarik. Disisi lain, hadirnya bidang tersebut mencirikan keberadaan partai politik yang secara langsung membutuhkan legitimasi masyarakat untuk menduduki posisi di lembaga pemerintahan (baik eksekutif maupun legislatif), maka dari itu perlu diiringi dengan keikutsertaan parpol dalam perannya di dalam pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok perempuan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik merupakan bagian dari etika politik sebagai wujud tanggung jawab sosial. Adapun pemilihan program RKI sebagai lokus pemilihan dari program partai PKS yang merupakan partai kader dengan sistem jejaring yang terstruktur. Rumah Keluarga Indonesia sendiri sebagai program unggulan guna memberikan pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat. PKS yang terkenal dengan *male party*, namun militansi kadernya memberikan nilai positif bagi PKS sendiri untuk menjaring kader-kader baru karena dikenal dengan militansi para kadernya. Namun posisi-posisi perempuan di struktur maupun parlemen masih kurang strategis.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang sudah dipaparkan, penelitian ini bermaksud untuk menelusuri bagaimana peran interaksi yang dibangun oleh kader perempuan PKS dalam mensinergikan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga sekaligus berperan dalam menjalankan fungsi politiknya dalam menjaring kader-kader perempuan baru. Berangkat dari fenomena dan persoalan perempuan sebagaimana yang dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji bagaimana peran yang dilakukan oleh para kader perempuan PKS DPD Depok melalui program Rumah Keluarga Indonesia dalam menjaring kader-kaderperempuan baru di PKS pada periode 2021 hingga 2023.

Urgensi penelitian ini ialah karena keterlibatan perempuan di sektor publik khususnya dalam struktural kepartaian di PKS masih sangat lemah, namun penitng untuk melihat bagaimana model pemberdayaan yang dilakukan oleh para kader perempuan PKS Depok dalam rangka meningkatkan partisipasi politik yang paling tepat dalam menjaring kader-kader baru. Penelitian ini diharapkan akan menggambarkan hasil bahwa strategi pendekatan dalam menjaring kader-kader perempuan baru melalui program pemberdayaan akan mampu meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selanjutnya diharapkan akan memberikan kebermanfaatan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah strategis yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian peran diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam (Sunarto, 2018) peran lebih ditunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses dinamis. Tepatnya adalah ketika seseorang menduduki suatu posisi atau status dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Dalam pendekatan untuk menjelaskan peranan kader perempuan di dalam politik, peneliti menggunakan pendekatan peranan representatif menurut Hana

Pitkin. Menurut Pitkin, representasi merupakan suatu konsep yang diciptakan oleh manusia. Konsep ini dapat diterima oleh satu individu, namun bisa dipertanyakan oleh individu lain. Bahkan, konsep representasi dapat direduksi atau disederhanakan oleh seseorang sehingga dianggap ada berdasarkan kepercayaan mereka. Wulandari dkk (2023) mengatakan bahwa kurangnya akses ke sumber daya keuangan, politik internal partai, dan status perkawinan perempuan dapat menjadi hambatan bagi perempuan.

Konsep ini dapat memiliki berbagai makna yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Sebuah konsep sendiri tidak memiliki manfaat yang signifikan tanpa adanya unsur-unsur lain yang dapat menjelaskan definisi konsep tersebut, seperti situasi, cara penggunaan, dan informasi tentang apa yang direpresentasikan. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh kalangan perempuan bukan hanya sebuah definisi yang tepat, tetapi cara yang layak untuk menggunakan dalam berbagai situasi(konteks) yang berbeda bagaimana sesuatu yang tidak ada dibuat ada dan siapa yang melakukan ini.

Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau ‘*way of acting*’ atau ‘*acting for*’, sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi sebagai ‘*way of being*’ atau ‘*standing for*’ untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakkan:

- a. Representasi *formal* dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya. Yang dimaksudkan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seseorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.
- b. Representasi *simbolis* adalah cara-cara seorang wakil ‘*stand for*’ (membela) konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan

merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok Agama Islam. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah situasi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

- c. Representasi yang *deskriptif* merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stand for*). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan – layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis masyarakat bahwa wakil-wakil yang menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.
- d. Representasi *substansif*. Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil mempresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis. Contoh yang dapat digunakan untuk bentuk representasi ini misalnya mewakili satwa langka yang hampir punah. Keempat macam representasi yang dikemukakan oleh Pitkin ini merupakan bentuk representasi yang muncul terkait dengan gagasan aktivitas, misalnya membuat representasi

yang deskriptif atau menciptakan sebuah simbol.

Menurut Pitkin jika seorang wakil melanggar keinginan konstituen maka seorang wakil harus dievaluasi berdasarkan isu yang ditanganinya dan lingkungan politik dimana ia harus bertindak. Menurut Pitkin, sebuah pemerintah dapat dikatakan representatif bukan dengan membuktikan bahwa rakyatnya dapat dikontrolnya, tetapi dengan menunjukkan bahwa rakyatnya mempunyai kontrol atas apa yang dilakukan pemerintah

2.2 Pemberdayaan Perempuan

Salah satu penelitian Robi Firdaus (2011) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKS di Desa Margahayu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Pada penelitiannya menghasilkan data bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKS di Desa Margahayu selatan ialah program pemberdayaan yang berfokus pada kegiatan ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Kegiatan dilakukan dengan metode kajian keagamaan Islam yang memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai budi pekerti dan akhlakul karimah. Strategi yang dilakukan ialah dengan musyawarah, pertimbangan, dan koordinasi. Dengan tahapan pertama, melakukan sosialisasi langsung di masyarakat. Kedua, pengoptimalan program dengan mengikutsertakan masyarakat. Ketiga, terjun langsung ke masyarakat. Keempat, menghadirkan kader kompeten dari internal partai, namun tidak membawa identitas PKS. Kelima, mengajak para pemuda dan tokoh masyarakat. Kegiatan pemberdayaan di Desa Margahayu dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat.

Keberhasilan suatu pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua lapisan masyarakat. Namun perlu diketahui terdapat beberapa indikator dalam mencapai keberhasilannya menurut Edi Suhato (2003:57) dalam bukunya berjudul *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* sebagai berikut :

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin (dalam hal ini termasuk pendidikan politik)

2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka
3. Meningkatnya jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi, dengan demikian perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karir sebagaimana halnya laki-laki
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan
5. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan

1.3 Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Miriam Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan hak suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam kutipan Mohtar Mas'ood (2011:57–58) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik perempuan yang paling populer untuk memenuhi kuota afirmasi ialah dengan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan atau partai politik.

Metode

Fokus penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peran kader perempuan PKS dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Depok melalui program Rumah Keluarga Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan para informan ahli yang merupakan kader PKS diantaranya, Sekretaris DPD PKS Depok, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Depok, Anggota Legislatif Perempuan DPRD Depok Fraksi PKS, serta dua informan pendukung yang merupakan partisipan dari program Rumah Keluarga Indonesia. Serta melakukan observasi non partisipan kepada dua informan pendukung yang merupakan partisipan perempuan dari program Rumah Keluarga Indonesia yang digunakan sebagai data primer, kemudian mengumpulkan data melalui studi pustaka sebagai sumber data sekunder. Setelah data dikumpulkan kemudian data dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1984) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga penelitian selesai. Analisa data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

A. Posisi Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Depok

PKS Depok telah memberlakukan suatu kebijakan untuk melibatkan para kader perempuannya dapat bergerak aktif di ruang-ruang politik. Kader perempuan PKS tidak hanya dilibatkan untuk pencalonan anggota legislatif saja, tetapi kader perempuan PKS juga diberikan komposisi 30% dalam internal kepengurusan partai. Keterwakilan politik perempuan PKS di DPRD Kota Depok terdapat sejumlah 2 anggota legislatif perempuan. Sementara di internal DPD PKS Depok terdapat sejumlah 3 anggota perempuan yang menjadi badan pengurus harian partai.

Tabel 1 Daftar Pengurus Harian Partai Berjenis Kelamin Perempuan

No.	Nama	Jabatan
1	Iin Nur Fatimah	Ketua Divisi Perempuan dan Ketahanan Keluarga
2	Hani Handayani	Wakil Ketua Divisi Perempuan dan Ketahanan Keluarga
3	Katrina	Sekretaris Divisi Perempuan dan Ketahanan Keluarga

(sumber : Kesekretariatan DPD PKS Depok)

Strategi yang digunakan oleh PKS Depok ialah dengan menempatkan para kader perempuannya sebagai pengurus harian partai. Hal ini ditujukan guna membangun kesetaraan peranan perempuan di dalam politik, kesetaraan dalam artian perempuan PKS bisa membawa agenda perempuan untuk merubah budaya internal maupun eksternal partai PKS itu sendiri. Menurut Anne Phillips, secara umum representasi/ keterwakilan yang ada saat ini berangkat dari bentuk politik ide, dimana wakil politik ada dengan membawa berbagai ide atau gagasan dari orang-orang yang diwakilinya. Phillips mencetuskan sebuah konsep politik kehadiran sebagai bentuk representasi politik yang lebih ideal, menurutnya alternatif yang baik dari permasalahan tersebut adalah menempatkan representasi/ keterwakilan secara acak dan menyerupai komposisi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat sehingga seluruh kepentingan mampu disalurkan dengan baik.

Perubahan cara pandang ini terlihat dalam konsep pemberdayaan perempuan kader PKS. Penempatan peranan perempuan dalam kegiatan domestik dan publik, hal ini didukung dengan adanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga yang menjadi bidang khusus untuk kader perempuan dalam menjalankan agenda nya sebagai instrumen pembangunan dan juga dalam menjalankan agenda kaderisasi partai. Kebijakan penempatan perempuan di BPKK dan juga menghadirkan keterwakilan

perempuan di parlemen menjadi strategi PKS dalam mengoptimalkan partisipasi politik perempuan. PKS Depok sendiri memang menjadikan perempuan sebagai bagian dari aktivitas politik partainya. Ketika perempuan menjadi anggota PKS Depok, kader perempuan akan menjalani proses kaderisasi melalui bidang khusus yang mengurus tentang keperempuanan, yaitu Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. BPKK PKS Depok menjalankan program-programnya dengan berpedoman pada visi dan misi partai serta disesuaikan dengan 4 penekanan kaderisasi perempuan yaitu membentuk kualitas perempuan sebagai pribadi, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan perempuan sebagai bagian dalam kelembagaan. Sebagian besar kegiatan perempuan di PKS Depok dikoordinir oleh BPKK ini.

Merujuk pada AD/ART PKS Bab 2 tentang Sasaran dan Program pasal 2 ayat (4) terkait dengan program-program partai. Secara moralitas partai politik sebagai pilar demokrasi harus mampu menciptakan program yang membangun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, disisi lain partai politik saat ini juga perlu melibatkan agenda perempuan di dalam proses politik karena itu adalah cara terbaik dalam merepresentasikan suara perempuan. Oleh karenanya, semakin banyak program-program partai yang mengagendakan kepentingan perempuan akan menciptakan peran besar perempuan di dalam agenda pembangunan. Kader perempuan PKS berada di bawah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga atau bisa disebut sebagai BPKK. Bidang ini membawahi agenda- agenda perempuan baik itu di internal kepartaian maupun untuk masyarakat. PKS sendiri menganut sistem Partai Politik Islam, yang terhubung dengan visi kepartaian menjadi Mejadi partai Islam Rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga memiliki program-program yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat khususnya kalangan perempuan (ibu-ibu). Program yang dibuat sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Menurut AD/ART PKS Bidang yang membawahi agenda perempuan ini sifatnya turunan, dimulai dari tingkat Pusat (DPP), Tingkat Wilayah Provinsi (DPW), Tingkat Kab/Kota (DPD), Tingkat Kecamatan (DPC), Tingkat Kelurahan (DPRa), bahkan sampai ke titik-titik RW/RT. Hal ini juga menjadi sisi positif bagi PKS sendiri, dengan kaderisasi yang berjenjang mempermudah

mereka untuk memobilisasi masa, karena faktanya bahwa militansi kader PKS memang sangat kuat di Kota Depok. Melalui bidang tersebut, ada dua pokok besar program BPKK sesuai dengan amanat Musda 2020, yaitu penguatan peran perempuan yang berbasis keluarga, dan kedua pokok ketahanan keluarga. Program penguatan ketahanan keluarga ini mainstreamnya dengan Rumah Keluarga Indonesia (RKI). PKS membentuk sebuah program yang ditujukan untuk kegiatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Program tersebut dinamakan sebagai Rumah Keluarga Indonesia, program ini semakin diperkuat sejak Musda PKS tahun 2020 yang bertujuan untuk penguatan peran perempuan yang berbasis keluarga, dan kedua pokok ketahanan keluarga.

Sebelumnya peneliti akan memaparkan ada kondisi pendukung yang membuat peranan kader perempuan di PKS untuk menjalankan program tersebut sehingga membuahkan hasil bagi PKS sendiri. Faktor pendukung pertama adalah keterlibatan PKS sebagai partai yang membangun ketahanan keluarga, sehingga kiprah politisi kader perempuannya sangat didukung untuk melakukan program ini hingga akar rumput. Ketika informan memutuskan untuk bergabung dalam kepengurusan partai ada pengaruh suaminya yang juga merupakan seorang kader PKS, sehingga program ketahanan keluarga memerlukan aktivis perempuan di internal kadernya, dan hal ini menjadi semacam *privilege* bagi kader perempuan. Lebih jauh lagi, salah satu informan peneliti merupakan anggota legislatif dari PKS, ia menjalankan peranannya karena faktor visi-misi kepartaiannya yang sama dengan idealisme nya yaitu partai *rahmatan lil alamin* sehingga menurutnya apa yang dijalankan olehnya menjadi bagian dari ibadah.

B. Peran Rumah Keluarga Dalam Menjaring Kader-Kader Perempuan Baru di Partai PKS Depok

Di dalam program Rumah Keluarga Indonesia target utamanya adalah para keluarga yang ada di Kota Depok. Program ini memiliki beberapa program turunan diantaranya, Pembinaan Keluarga Sejahtera, Pos Ekonomi Keluarga, PKS Menyapa, Pendidikan Politik, dan lainnya. Kondisi saat ini

BPKK PKS menguatkan peran-peran perempuan di dalam keluarga, disamping itu tidak hanya peranan perempuan di dalam keluarga yang mereka terus gencarkan. Peranan ayah juga mereka gencarkan dalam program parentingnya. BPKK PKS menilai saat ini Indonesia berada di masa “*fatherless country*” sehingga penguatan peranan ayah di dalam keluarga sangat penting menurutnya. Strategi yang dilakukan oleh para kader PKS ialah dengan menempatkan titik-titik RKI yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh konkrit saat ini di Cimanggis terdapat titik RKI Sahabat Anak, yang lebih banyak menyediakan Taman Baca Untuk Anak, dikarenakan masyarakat di Cimanggis lebih membutuhkan lingkungan ramah anak. Selain itu, PKS juga mampu menjaring kader-kader perempuan muda melalui kegiatan RKI.

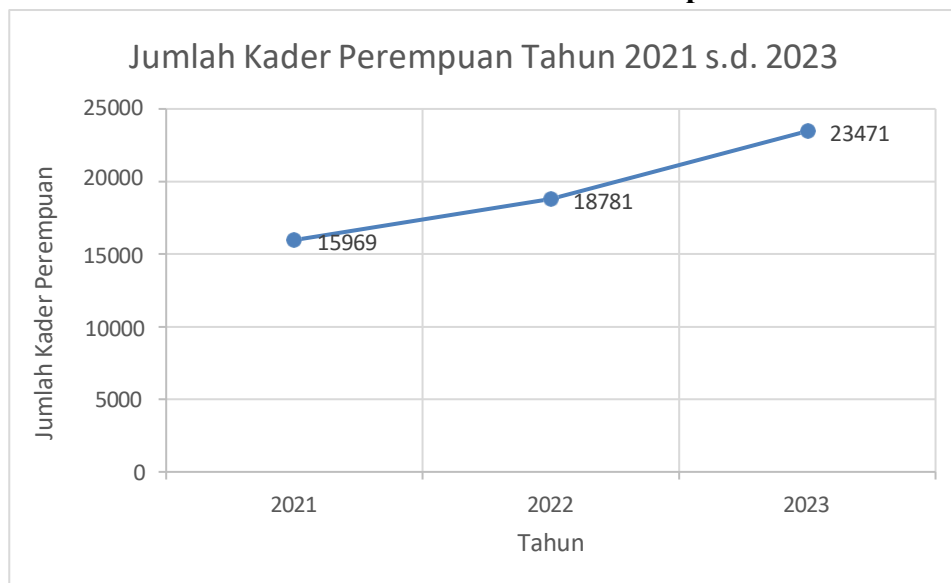
Melalui kegiatan RKI lah, peranan kader perempuan PKS dioptimalisasi oleh BPKK untuk menjaring kader-kader baru dengan membangun kepercayaan di konstituennya. PKS membangun program ini dengan tahapan: 1) survei kebutuhan, 2) pembentukan titik RKI, 3) pendampingan program RKI sesuai dengan titik kebutuhan. Selama ini perempuan PKS sering dinilai sebagai sosok yang konvensional. Bila dilihat dari tampilan luarnya, mereka kerap dinilai sebagai kalangan yang tidak modern. Demikian pula ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan partisipan program RKI. Hal yang membuat mereka tertarik dengan PKS karena para kader PKS yang tidak menunjukkan kepentingannya bahwa mereka merupakan anggota partai sehingga pendekatan secara kultural mudah diterima oleh masyarakat. PKS sendiri lebih menawarkan dalam bentuk program, program RKI lah yang menjadi kekuatan bagi PKS sendiri dalam menjaring kader-kadernya. Banyak kader perempuan yang merasa bahwa Rumah Keluarga Indonesia sangat menjunjung asas kepentingan perempuan dan juga penguatan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan wujud dari ketahanan nasional, aktivis perempuan dari PKS sangat menjunjung tinggi akan landasan ini.

Fenomena diatas mungkin bisa diinterpretasikan sebagai cara pandang baru terhadap penjaringan kaderisasi partai. Cara pandang baru ini adalah cara pandang yang dulu dilihat sebagai bahwa partai politik dalam menjaring kader-kader barunya dijanjikan dengan *uang* atau kemenangan sehingga kader-kader tidak bisa mandiri dan diberdayakan, namun kini penjaringan kader dipandang

sebagai 'companionship' melalui program pemberdayaan, kalangan perempuan yang menjadi target sasaran mampu memahami politik yang membawa kepentingan perempuan seperti apa. Sehingga tidak diiming-imingi persoalan uang, pemenuhan kuota afirmatif, dan posisi jabatan saja.

Dari keberhasilan program RKI dalam menjaring kader-kader baru menunjukkan angka angka signifikan terdapat peningkatan jumlah kader perempuan PKS baru yang di jaring di setiap kecamatan. Terdapat kenaikan sejumlah 4% dari tahun 2021 hingga 2023 jumlah kader perempuan PKS. Dari hasil ini membuktikan bahwa program RKI mampu menjadi startegi baru bagi PKS dalam menjaring kader-kader perempuan baru.

Grafik 1 Jumlah Kader Perempuan



Sumber : BPKK PKS Depok

Dari dua informan yang peneliti wawancara, keduanya mengatakan bahwa program RKI yang dilakukan oleh BPKK PKS Depok mampu mendorong minat mereka untuk berpartisipasi aktif di ruang politik, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan perempuan. Dimulai dari kegiatan yang memiliki unsur keluarga dan anak-anak. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Collin Mac Andrews

(2011:56–57) partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya, meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. PKS sendiri memang bukan bentuk suatu negara atau pemerintahan, tetapi PKS merupakan partai politik yang menjadi pilar dari suatu negara demokrasi. Sehingga peranan yang dilakukan oleh para kader perempuan PKS mampu menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan- kegiatan perempuan.

Membina hubungan yang baik dengan para pemilih dapat meningkatkan jumlah dukungan dalam pemilihan dan mendorong partisipasi warga dalam urusan publik. Ketika seorang legislator dari partai politik bekerja sama dengan aparat setempat, LSM, dan masyarakat umum untuk mengatasi masalah di wilayah mereka, dia mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan memajukan masyarakat. Dengan melibatkan lebih banyak warga dalam kebijakan dan keputusan publik, para perwakilan rakyat berjuang melawan sikap apatis dan membantu memperkuat demokrasi dengan pendekatan praktis dalam menyelesaikan masalah. Partai politik dan legislator yang menjalin hubungan yang kuat dengan pemilih juga membangun basis dukungan politik yang setia dan mendukung mobilitas relawan (National Democratic Institute, 2008).

Tujuan lainnya adalah agar masyarakat memiliki keberanian untuk memberikan kritik yang konstruktif terhadap kondisi yang tidak baik, serta mengarahkan aktivitas mereka dalam proses demokratisasi individu dan seluruh elemen lembaga masyarakat dan negara. Keterlibatan kader di dalam program-program pemberdayaan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu dalam berbagai aspek seperti kognitif, kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang di luar ruang politik dapat aktif berpartisipasi di luar lingkup kegiatan elektoral, sehingga partisipasi politik mampu menciptakan pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara (Kartono, 2009). Tujuan politis lainnya ialah untuk merekrut kader-kader perempuan baru melalui titik-titik RKI. Dari sebaran jumlah kader perempuan PKS di setiap kecamatan dan juga penugasan di titik-titik RKI mampu mendorong kontribusi kader perempuan PKS dengan

baik. Kader-kader PKS mampu menjaga basis konstituennya di masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh para kader perempuan PKS Depok mampu meningkatkan jumlah kader-kader perempuan baru.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, dan pembahasan yang disajikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kader perempuan pks menggunakan pendekatan peran representatif deskriptif dan simbolik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Depok melalui program RKI. Program RKI menunjukkan keberhasilan bagi PKS dengan adanya kenaikan jumlah kader baru, PKS melakukan pendekatan secara kultural melalui titik-titik RKI dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mempercayai bahwa PKS adalah partai yang cocok dan sejalan dengan visi-misinya. Disamping itu para informan membangun kepercayaan para konstituen sehingga masyarakat merasa bahwa adanya dukungan dan keterlibatan langsung dari partai tersebut.

Keterlibatan peranan kader perempuan mampu memberikan dampak positif dalam perkembangan politik, hal-hal yang semula mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari urusan politik seperti ketahanan keluarga, namun program ini mampu memberikan kebermanfaatn dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan juga perkembangan partai itu sendiri. Namun masih terdapat tantangan lain dalam program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh partai politik. Diantaranya: 1) Sisi kepercayaan diri dari kader perempuan itu sendiri, perempuan harus berjuang lebih keras ditengah lingkungan patriarkisme, ditambah PKS sebagai partai yang didominasi oleh kalangan laki-laki yang menjabat di posisi-posisi strategis, 2) Sikap apatisme masyarakat, yang masih menganggap bahwa kegiatan politik adalah kegiatan yang diakhiri dengan ‘bagi-bagi amplop’, 3) *Money Politics*, banyak kader-kader baru yang terjebak dalam manifestasi money politics, PKS sudah menyiapkan program sebagai langkah untuk kadernya memmanifestasikan sebuah program yang sifatnya pelayanan dan pengabdian, sehingga tidak memerlukan politik mahar.

Referensi

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S. P., Nelson, J. M., & Simamora, S. (translator). (1990). *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*. Rineka Cipta.
- Mas'ood, M. (2011). *Perbandingan Sistem Politik* (C. MacAndrews (ed.)). Gadjah Mada University Press.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International - Indonesia Programme.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Penerbit Buku Kompas.
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (Cetakan ke). Mizan.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widusuarana.
- Vitalaya, A. S. H. (2011). *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa* (2nd ed.). PT. Penerbit IPB Press.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.
- Cowell-Meyers, K. (2016). Women's Political Parties in Europe. *Politics & Gender Journal*, 12, 1–27.
- Haryati, E., Yuwanto, Y., & Fitriyah, F. (2017). Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara. In *Journal of Politic and Government Studies* (Vol. 6, Issue 04). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17617>
- Mengesha, E. H. (2022). *Women's Representation in Ethiopia's Political Parties: Issues of Inclusion and Diversity - ISS Africa*. <https://issafrika.org/research/east-africa-report/womens-representation-in-ethiopias-political-parties-issues-of-inclusion-and-diversity>
- Wulandari, L., Rahmawati, R., & Rosdiana, H. (2023). Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(2), 168-186.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142.
- Zakiah. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al Irsyad Surabaya. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, 18(01), 44. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.113>

- DepokNews. (2022). *Sri Utami Paparkan Tugas dan Fungsi Komisi DPRD Depok*. DepokNews.
<https://depoknews.id/sri-utami-paparkan-tugas-dan-fungsi-komisi-dprd-depok/>
- KPU RI. (2019). *Lampiran Keputusan KPU No. 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019*.